

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Tanah Datar merupakan bentuk upaya dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat Kabupaten Tanah Datar serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara keseluruhan, strategi pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan juga peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung objek wisata di Kabupaten Tanah Datar. Namun kendala dan masalah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar masih ditemui seperti, ketersediaan lahan untuk pengembangan pariwisata, Pemerintah Tanah Datar masih terkendala dengan status tanah atau status lahan yang berada di lokasi objek wisata. Karena banyak lahan di sekitar objek wisata yang statusnya adalah milik masyarakat, dan milik kaum/adat sehingga menjadi penghambat bagi pemerintah untuk pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di objek wisata.

Selain itu, masih terdapat masalah yang ditemui yaitu masyarakat yang bersentuhan langsung dengan wisatawan masih belum memberikan pelayanan yang optimal dan kesadaran masyarakat masih relatif rendah. Pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Tanah Datar kepada masyarakat atau

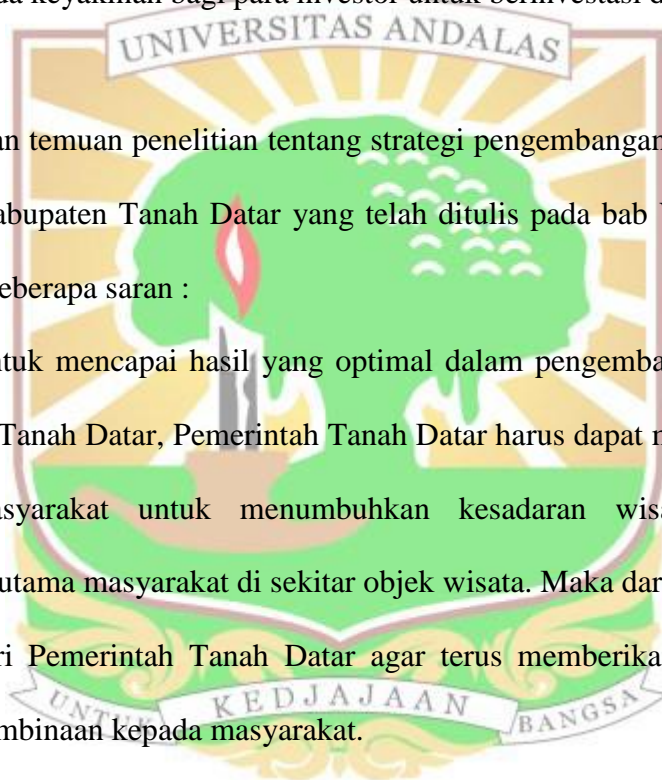
pedagang di sekitar objek wisata agar dapat meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang.

Selanjutnya regulasi atau aturan yang belum lengkap dalam pengembangan pariwisata dan RIPPDA yang belum ada karena masih dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Tanah Datar, sehingga pengembangan pariwisata di Tanah Datar belum jelas dan belum terarah dan juga akan berdampak pada keyakinan bagi para investor untuk berinvestasi di Tanah Datar.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian tentang strategi pengembangan pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang telah ditulis pada bab V, berikut ini di disampaikan beberapa saran :

1. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengembangan pariwisata di Tanah Datar, Pemerintah Tanah Datar harus dapat merubah *mindset* masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran wisata masyarakat terutama masyarakat di sekitar objek wisata. Maka dari itu perlu upaya dari Pemerintah Tanah Datar agar terus memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus memiliki landasan hukum dalam hal ini berupa RIPDA agar pengembangan pariwisata yang dilakukan menjadi lebih jelas dan terarah untuk jangka panjang serta memiliki landasan hukum yang kuat.
3. Semua aturan atau regulasi untuk pengembangan pariwisata di Tanah Datar harus dilengkapi agar dapat potensi wisata dapat dimaksimalkan



untuk pendapatan daerah dan juga untuk meyakinkan investor mau berinvestasi dalam pengembangan pariwisata di Tanah Datar.

4. Fasilitas umum serta sarana dan prasarana di objek wisata harus lebih diperhatikan seperti toilet, mushalla, tempat parkir, dll. Karena tidak semua objek wisata yang mempunyai fasilitas serta sarana dan prasarana umum yang layak.
5. Pariwisata sifatnya multi sektor, maka dari itu perlu support atau dukungan dari OPD lain agar upaya pengembangan pariwisata di Tanah Datar dapat berjalan dengan optimal.
6. Kesadaran dari wisatawan juga harus diperlukan misalnya tentang K3. Seperti, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Kepada pengusaha, perantau, asosiasi pariwisata dan investor diharapkan peranan sertanya dalam peningkatan investasi untuk Kabupaten Tanah Datar dalam rangka memajukan dan mengembangkan pariwisata di Tanah Datar.

